



Pemerintah Resmi Naikkan PPN 12%

Jakarta, MIMBAR - Pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, kecuali sembako.

Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

■ Bersambung ke Hal 11



JELANG NATARU

Kapolri Imbau Pemudik Tidak Berkendara Lebih dari 8 Jam

Jakarta, MIMBAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau kepada para pemudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 untuk tidak berkendara lebih dari 8 jam demi keselamatan berkendara.

Sigit mengaku telah menyiapkan pos pengamanan (posпам), pos pelayanan (posyan) hingga rest area yang bisa digunakan para pengemudi untuk beristirahat.

"Sehingga harapan kita kemampuan masyarakat untuk berkendara memaksimalkan 7 jam atau 8 jam,

■ Bersambung ke Hal 11



Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK

Jakarta, MIMBAR - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.

Pelantikan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menyaksikan langsung pengucapan sumpah jabatan para pimpinan baru KPK.

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya

senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya," ucap para pimpinan KPK dan Dewas KPK, Senin (16/12).

Pelantikan ini

juga dituangkan ke dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 161/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi

■ Bersambung ke Hal 11



Sumber foto: BPMI Semras

Musibah Banjir Landa Tuban, Jawa Timur

100 Rumah Terendam Air, 150 KK Terdampak

MUSIBAH banjir melanda Kabupaten Tuban sejak Ahad (15/12) kemarin. Peristiwa ini terjadi akibat meluapnya Sungai Temayang dan Sungai Bokong, serta banjir kiriman yang membawa material lumpur di beberapa kecamatan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, mengatakan banjir melanda Kecamatan Kerek, Kecamatan Montong, dan Kecamatan Rengel.

"Banjir kiriman di Kecamatan Rengel membawa lumpur setinggi 25 cm yang membahayakan pengguna jalan," kata Satrio dalam keterangannya,



Selasa (16/12).

Dampaknya di Kecamatan Kerek ketinggian banjir mencapai 30 cm, 150 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Kemudian Kecamatan Montong ketinggian banjir 45 cm, 100 rumah terendam. Kemudian

Kecamatan Rengel ketinggian banjir 30 cm dan lumpur setinggi 25 cm menutupi jalan.

"Meskipun demikian, tidak ada korban jiwa atau pengungsi dalam kejadian ini. Hingga saat ini,

■ Bersambung ke Hal 7



Jokowi Dipecat PDIP, Golkar Siap Tampung

Jakarta, MIMBAR - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menerima Joko Widodo yang telah dipecat sebagai kader PDIP.

"Sebagai partai terbuka, tidak ada halangan bagi Golkar untuk menerima

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat
15 JUMADIL AKHIR 1446 H
Subuh : 05:03 WIB Maghrib : 18:22 WIB
Zuhur : 12:25 WIB Isya : 19:36 WIB
Ashar : 15:47 WIB ■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Sembako Dikhawatirkan Naik

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)

Meskipun sembako dikecualikan dari kenaikan PPN 12%, kemungkinan harga sembako tetap naik karena beberapa faktor ekonomi yang saling berkaitan.

Berikut adalah alasan mengapa kenaikan harga sembako bisa terjadi meski bebas PPN, barang dan jasa yang digunakan dalam produksi dan distribusi sembako (seperti bahan bakar, listrik, kemasan, dan transportasi) tetap dikenai PPN 12%.

■ Bersambung ke Hal 11



■ Kenak peras lagi terus ah...
■ Hehehe...

100 Rumah...

Dari Halaman 1

kondisi banjir di wilayah terdampak dilaporkan mulai berangsur surut," ucapnya.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Tuban bersama BPBD Provinsi Jawa Timur segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan kaji cepat.

Selain itu, mereka juga

membantu warga membersihkan air yang masuk ke dalam rumah serta menyingkirkan material lumpur dari jalan guna memulihkan akses.

Pihak BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat cuaca ekstrem masih dapat terjadi di wilayah tersebut. **(cnni/js)**



Hidayah

Sembako Dikhawatirkan

Dari Halaman 1

Jika biaya-biaya ini meningkat, produsen atau distributor kemungkinan akan menaikkan harga akhir sembako untuk mengimbangi biaya tambahan.

Contoh: Kenaikan harga bahan bakar atau layanan logistik dapat berdampak langsung pada biaya pengiriman beras, sayuran, atau ikan.

Kemudian, kenaikan PPN pada barang lain dapat menciptakan persepsi bahwa harga barang secara umum akan meningkat. Pedagang atau distributor sembako mungkin ikut menaikkan harga, meskipun tidak ada perubahan langsung pada PPN sembako itu sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai "harga bayangan," di mana ekspektasi inflasi memicu kenaikan harga secara luas.

Ketertarikan pada barang non-Sembako membuat banyak pedagang sembako juga menjual barang lain yang tidak bebas PPN, seperti makanan olahan. Kenaikan harga pada produk tersebut dapat memengaruhi kebijakan harga sembako di toko atau pasar yang sama.

Kenaikan PPN sering berkontribusi pada inflasi, terutama jika mencakup banyak barang konsumsi. Inflasi ini dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat secara keseluruhan, termasuk harga sembako. Produsen bahan makanan mungkin menaikkan harga karena tekanan inflasi, meskipun sembako itu sendiri bebas PPN.

Faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan pokok di pasar internasional (beras, gandum, gula) dapat memengaruhi harga sembako di dalam negeri. Jika kenaikan PPN meningkatkan biaya impor atau ekspor, hal ini bisa berdampak pada ketersediaan dan harga sembako.

Jika pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan aturan bebas PPN pada sembako, misalnya dengan mengubah klasifikasi barang yang dikecualikan, hal ini bisa berdampak langsung pada harga sembako.

Meski sembako dikecualikan dari kenaikan PPN, efek tidak langsung seperti kenaikan biaya produksi, distribusi, inflasi, atau ekspektasi pasar dapat mendorong harga sembako naik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasi rantai distribusi: Pastikan biaya tambahan dari PPN 12% tidak diteruskan secara tidak langsung ke harga sembako.

Pemerintah juga harus menjaga stabilitas Pasar, misalnya, dengan subsidi untuk sektor transportasi atau bahan bakar yang memengaruhi distribusi sembako.

Harus dilakukan kampanye edukasi pasar agar pedagang memahami kebijakan bebas PPN untuk sembako dan tidak menaikkan harga tanpa dasar.

Jika langkah-langkah ini tidak diambil, dampak kenaikan PPN dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk melalui sembako yang seharusnya bebas dari dampaknya.

Dari perspektif teori komunikasi politik, ke-

naikan PPN menjadi 12% yang diiringi pengecualian sembako dan barang kebutuhan pokok dapat dianalisis dalam beberapa aspek utama, yaitu strategi komunikasi pemerintah, konstruksi narasi kebijakan, dan pengaruhnya terhadap opini publik. Berikut penjelasannya:

Pemerintah tampaknya menggunakan strategi komunikasi politik yang adaptif untuk mengelola penerimaan publik terhadap kebijakan ini. Beberapa poin utama: yakni Framing Positif dimana Pemerintah menekankan bahwa kenaikan PPN hanya menyasar barang mewah dan tidak berlaku untuk barang kebutuhan pokok seperti sembako, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah upaya untuk mengurangi potensi resistensi publik dengan menonjolkan bahwa kelompok rentan tidak akan terkena dampak langsung.

Kebijakan ini dikomunikasikan sebagai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menegaskan bahwa langkah tersebut adalah bagian dari perencanaan jangka panjang dan bukan keputusan mendadak. Hal ini memberikan kesan bahwa kebijakan didasarkan pada proses yang terencana dan bukan sekadar strategi ad hoc.

Pemerintah mengumumkan kebijakan ini bersama paket stimulus ekonomi, yang menjadi bagian dari narasi bahwa kebijakan pajak ini tidak berdiri sendiri, tetapi sejalan dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat.

2. Perspektif Teori Agenda-Setting Menurut teori agenda-setting, media memainkan peran penting dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam kasus ini:

Pemerintah berupaya mengontrol agenda media dengan menyisipkan elemen positif, seperti pengecualian sembako dari PPN dan paket stimulus ekonomi, untuk mengalihkan perhatian dari potensi dampak negatif kenaikan pajak.

Pemilihan isu dominan seperti "perlindungan masyarakat kecil" dan "pajak barang mewah" menjadi upaya untuk menciptakan persepsi bahwa kebijakan ini adil dan pro-rakyat.

Karena pajak sering menjadi isu sensitif, pengumuman ini dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi krisis. Beberapa langkah yang diambil pemerintah mencerminkan elemen komunikasi krisis, seperti transparansi. Pemerintah menjelaskan alasan kebijakan ini secara gamblang, termasuk landasan hukum dan tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara.

Mitigasi Dampak Negatif yakni dengan menyertakan paket stimulus ekonomi, pemerintah mencoba meredakan kecemasan publik terkait potensi kenaikan harga.

Kemudian menonjolkan kebijakan pro-rakyat bahwa bebas PPN untuk barang pokok ditekan untuk menciptakan persepsi bahwa pemerintah peduli terhadap kebutuhan dasar masyarakat. ***

NETANYAHU PERLUAS CENGERAMAN

Arab Saudi-Qatar Meradang

Golan, MIMBAR - Pemerintah Israel secara resmi menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memperluas pemukiman Israel di Dataran Tinggi Golan yang telah diduduki sejak 1967.

Keputusan ini melibatkan anggaran sekitar 40 juta Shekel atau setara dengan Rp177,8 miliar, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru di wilayah tersebut.

Netanyahu menyatakan bahwa penguatan Israel di Golan adalah langkah penting untuk memperkuat negara tersebut, terutama setelah pergantian kekuasaan di Suriah. "Kami akan melanjutkan pembangunan dan memperluas keberadaan kami di sana," kata Netanyahu, dikutip dari Washington Post, Senin 16 Desember 2024.

Langkah ini dilakukan di tengah ketegangan yang meningkat di Suriah, pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad minggu lalu. Keputusan Netanyahu tersebut akan semakin memperbu-

ruk hubungan dengan negara-negara tetangga.

Setelah jatuhnya rezim Assad pada 8 Desember, Israel telah memperluas operasi militer di Suriah, termasuk serangan udara dan penempatan pasukan di wilayah Golan yang sebelumnya disepakati sebagai zona demilitarisasi setelah Perang Yom Kippur 1973.

Netanyahu mengklaim bahwa perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada tahun 1973 sudah "kolaps" setelah perubahan pemerintahan di Damaskus.

Pemimpin de-facto baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengecam tindakan Israel, menyebutnya sebagai "petualangan militer tanpa perhitungan". Namun, ia juga menyatakan bahwa prioritas utama Suriah adalah rekonstruksi negara dan stabilitas, bukan membuka konflik baru.

Dataran Tinggi Golan, yang menjadi wilayah sengketa antara Israel dan Suriah, kini dihuni oleh sekitar 50 ribu

orang, dengan setengahnya adalah pemukim Israel dan sisanya terdiri dari etnis Druze, Alawit, dan lainnya. Israel telah mendirikan 33 pemukiman di kawasan tersebut yang kini dikelola oleh Dewan Regional Golan.

Keputusan Israel untuk memperluas pemukiman ini mendapat kecaman keras dari Arab Saudi dan Qatar. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa tindakan Israel merusak peluang bagi Suriah untuk mencapai stabilitas dan keamanan. Saudi juga mendesak komunitas internasional untuk mengutuk pelanggaran ini dan menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan Suriah.

Qatar juga mengeluarkan pernyataan keras, menyebut tindakan Israel sebagai "agresi terang-terangan" yang melanggar hukum internasional. Qatar menegaskan bahwa komunitas internasional harus segera mengambil langkah untuk menghentikan pendudukan Israel dan mendukung kedaulatan Suriah.

Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 10 Desember 2024 kembali menuntut Israel untuk menarik diri dari Dataran Tinggi Golan hingga batas 1967.

Resolusi ini didukung oleh 97 negara dan menegaskan bahwa segala tindakan Israel di wilayah tersebut adalah ilegal. Negara-negara seperti Bolivia, Kuba, dan Mesir turut menekan Israel untuk menghormati hukum internasional dan menghentikan pembangunan pemukiman.

Selain itu, Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas zona penyangga di Golan setelah jatuhnya rezim Baath Suriah merupakan pelanggaran Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974 antara Israel dan Suriah.

PBB terus memantau situasi ini dengan ketat dan mendesak agar semua pihak kembali ke meja perundingan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. **(rm/js)**

Israel Lancarkan Bom Dahsyat di Tartus Suriah

Suriah, MIMBAR - Untuk pertama kalinya selama lebih dari satu dekade, Israel meluncurkan serangan bom terbesar yang daya ledaknya sampai terhitung dalam sensor gempa bumi. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, serangan terberat yang dilancarkan Israel pada Minggu, 15

Desember 2024 menargetkan pangkalan militer milik rezim Assad di wilayah pesisir Tartus, Suriah.

"Pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang menargetkan serangkaian lokasi termasuk unit pertahanan udara dan depot rudal permukaan-ke-permukaan Assad di Tartus," ungkap laporan

tersebut, seperti dimuat Daily Mail.

Ledakan itu disebut sangat besar dan terukur berkekuatan 3,0 pada sensor seismik (gempa bumi).

Tartus telah menjadi lokasi salah satu dari dua pangkalan militer Rusia di Suriah dan digunakan sebagai pangkalan angkatan laut, serta depot amunisi.

Ledakan dahsyat yang terjadi menunjukkan adanya sejumlah besar persenjataan yang disimpan di lokasi tersebut. Video dramatis yang beredar di media sosial menunjukkan kilatan cahaya yang sangat terang diikuti oleh beberapa ledakan yang mengiriskan awan asap jamur yang sangat besar ke udara. **(rm/js)**

Pemerintah Resmi...

Dari Halaman 1

Hal ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menteri Kabinet Merah Putih lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

"Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," ujar Airlangga.

Namun, Airlangga menegaskan tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justru diberikan fasilitas bebas PPN.

Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. "Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen ... seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu," imbuhnya.

Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Pajak pertambahan nilai (PPN) tetap naik menjadi 12 persen pada tahun depan, tetapi kenaikan tarif PPN itu hanya menyasar barang mewah.

Menurutnya, kenaikan tarif PPN merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmo-

nisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kenaikan PPN sebesar 12 persen yang hanya menyasar barang mewah sudah dibocorkan DPR usai sejumlah pimpinan DPR RI bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan kenaikan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, PPN tahun depan berpeluang tidak berlaku satu tarif. Menurutnya, pungutan 12 persen hanya untuk barang mewah, sedangkan sisanya yang mencakup barang pokok hingga layanan masyarakat tetap pada tarif lama.

"Pemerintah hanya memberikan beban itu (PPN 12 persen) kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku (11 persen)," kata Misbakhun di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Misbakhun meminta masyarakat tidak khawatir. Ia juga mencontohkan bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan layanan lain yang sifatnya pelayanan umum tetap tak dipungut PPN.

PPN di Indonesia saat ini hanya satu tarif, yakni 11 persen. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPN bakal dinaikkan menjadi 12 persen mulai tahun depan. Pasal 7 UU HPP menetapkan PPN sebesar 11 persen berlaku 1 April 2022, naik dari sebelumnya 10 persen. Baru akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Tarif Listrik Daya 2.200 VA Didiskon

Sementara itu, Pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya listrik hingga 2.200 Volt Ampere (VA). Kebijakan ini berlaku selama dua bulan, yakni Januari hingga Februari 2025.

Kapolri Imbau...

penyelamatan apabila terjadi kecelakaan," ujarnya.

Sigit juga memerintahkan jajarannya untuk mensosialisasikan kepada para masyarakat terkait batas kecepatan di wilayah rawan kecelakaan. Apalagi, lanjut dia, BMKG juga memprediksi curah hujan masih tinggi dan berpotensi menyebabkan bencana banjir hingga tanah longsor. "Ini tentunya juga kami himbau terkait dengan informasi di awal terhadap masyarakat sehingga kemudian pada saat terjadi hujan dan kemudian terjadi ombak tinggi, masyarakat sudah terinformasi lebih dulu sehingga paling tidak bisa mengurangi untuk tidak terjadi penumpukan di wilayah dermaga," tutur dia.

Sebelumnya, Polri memprediksi puncak arus

Diskon diberikan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang akan ditimpa beban baru pada awal 2025 mendatang; kenaikan PPN jadi 12 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan diskon tarif listrik ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik.

"Ini diberikan selama 2 bulan, Januari-Februari," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12).

Sri Mulyani menyebut akan ada 81,4 juta rumah tangga di seluruh Indonesia yang mendapatkan diskon ini.

Sri Mulyani menegaskan kebijakan ini menggunakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. "Sehingga ekonomi kita tetap jalan meski kita pahami banyak dinamakan global yang terjadi dan di dalam negeri yang terus kita waspadai," tambahnya.

Selain diskon listrik, pemerintah juga meluncurkan beberapa stimulus lainnya untuk mendukung kelompok rumah tangga, pekerja, dan UMKM. Untuk rumah tangga, disalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan selama Januari-Februari 2025 kepada 16 juta penerima manfaat. Untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah akan mempermudah akses terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sementara itu, bagi UMKM, pemerintah memperpanjang masa berlaku tarif PPh final sebesar 0,5 persen hingga tahun 2025 dan membebaskan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. **(cnni/js)**

Baroto seorang jaksa, Sumpeno adalah hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Gusrizal merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda.

Nama-nama tersebut adalah hasil seleksi sejak periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Jokowi menyanggah sejumlah nama melalui panitia seleksi. Nama-nama terpilih dikirim ke DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan. Rapat Pleno Komisi III DPR RI Kamis (21/11) menetapkan lima orang pimpinan dan dewas KPK periode 2024-2029. **(cnni/js)**

Jokowi menyanggah sejumlah nama melalui panitia seleksi. Nama-nama terpilih dikirim ke DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan. Rapat Pleno Komisi III DPR RI Kamis (21/11) menetapkan lima orang pimpinan dan dewas KPK periode 2024-2029. **(cnni/js)**

Prabowo Lantik...

Dari Halaman 1

Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Pimpinan KPK yang dilantik hari ini adalah Setyo Budiyo, Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Setyo Budiyo terpilih sebagai ketua. Setyo Budiyo adalah mantan Direktur Penyidikan KPK yang saat ini menjabat Irjen Kementerian Pertanian. Johanis Tanak adalah

komisioner petahana.

Fitroh Rohcahyanto merupakan jaksa yang sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK. Agus Joko Pramono berstatus mantan Wakil Ketua BPK. Ibnu Basuki Widodo adalah hakim di Pengadilan Tinggi Manado.

Sementara itu, lima orang Dewas KPK adalah Wisnu Baroto, Benny Mamoto, Gusrizal, Chisca Mirawati, dan Sumpeno.

Chisca Mirawati adalah Founder & Managing Partner CMKP Law. Benny Mamoto adalah mantan Ketua Harian KOMPOLNAS. Wisnu

Jokowi Dipecat...

Dari Halaman 1

beliau (Jokowi) dengan tangan terbuka," kata Sekjen Golkar, Ahmad Sarmuji, Senin, 16 Desember 2024.

Di sisi lain, Sarmuji mengaku tak kaget dengan keputusan PDIP memecat Jokowi. Sebab, ia sudah menangkan pesan partai yang dinakhodai Megawati Soekarnoputri itu bakal mengeluarkan Jokowi dari partai.

"Saya pikir ini bukan sebuah kejutan akhir

tahun karena sudah berkali-kali disampaikan, baik secara eksplisit maupun implisit," tuturnya.

Kendati begitu, Sarmuji menghormati keputusan PDIP memecat kadernya dari keanggotaan, termasuk menghormati langkah politik Jokowi ke depan berubah ke partai mana.

"Saya pikir Pak Jokowi sekarang dalam tahap merenung untuk langkah beliau selanjutnya di politik. Kita tunggu saja langkah Pak Jokowi selanjutnya," pungkasnya.

PDIP telah memecat Jokowi sebagai kader banteng. Tidak hanya Jokowi, partai pimpinan Megawati ini juga memecat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Bobby Nasution.

Pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Sementara pemecatan Gibran berdasarkan SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024, dan pemecatan Bobby SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024. **(rm/js)**